

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai peran dan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, bidang Ketenagakerjaan dan bidang Transmigrasi.
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Ketenagakerjaan dan bidang Transmigrasi.
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Ketenagakerjaan dan bidang Transmigrasi.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan kelima peran tersebut, diupayakan secara optimal. Walaupun disadari tentunya masih terdapat persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Dengan demikian, permasalahan

sering terjadi dalam hal tidak konsistennya antara aspek rencana/target dengan aspek implementasinya.

Secara rinci identifikasi permasalahan yang dihadapi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

Sektor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah masih dihadapkan pada permasalahan klasik antara lain :

- 1) Penguasaan dan penerapan Teknologi Informasita pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum optimal;
- 2) Rendahnya manajemen usaha koperasi dan UMKM;
- 3) Terbatasnya permodalan koperasi dan UMKM;
- 4) Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM;
- 5) Lemahnya akses pemasaran produk UMKM;
- 6) Kemitraan antar KUKM dengan pengusaha besar, BUMN maupun BUMS. belum optimal;

Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Mempunyai Permasalahan dalam pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi antara lain :

- 1) Tingginya tingkat pengangguran, akibat dari tidak seimbangya pencari kerja dengan kesempatan lapangan kerja;
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan keterampilan, produktivitas angkatan kerja dan pekerja;
- 3) Terbatasnya lapangan kerja sektor informal dan di pedesaan;
- 4) Rendahnya penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, baik yang bekerja di dalam Negeri maupun du luar Negeri;
- 5) Keterbatasan informasi ketransmigrasian dan lokasi target penempatan calon transmigrasi;

- 6) Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan keterampilan / keahlian masyarakat di lokasi Transmigrasi lokal ( Translok );
- 7) Terbatasnya anggaran untuk pembinaan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Kabupaten Tasikmalaya dalam pembangunan jangka menengah 2016-2021 lebih diprioritaskan terhadap pembangunan dengan menitikberatkan kepada perdesaan. Sejalan hal tersebut terdapat permasalahan yang harus dihadapi antara lain kemiskinan, keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja serta kesenjangan sosial. Untuk menghadapi fenomena itu memerlukan penguatan sosok pemimpin yang perlu didukung oleh rakyat.

#### **VISI**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020 adalah :

***“ KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DIBIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN “***

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya tersebut sesuai dengan RPJMD tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

#### **Religius/Islami**

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat

keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religi** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

**Islami** dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘Salm’ (السَّلْمُ) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيمٌ) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَامٌ) yang berarti selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, *Religi/Islami* merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek *Religi/Islami* dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religi-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata

kelola pemerintahan (*al-hukma*), peradaban dalam hubungan antar warga (*al-nubuwwah*), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Kalimat "*Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami*" sebagaimana terumuskan dalam "**visi**" dimaksud adalah menjadikan spirit kehidupan beragama Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

### **Dinamis**

Dinamis adalah semangat untuk mampu mengikuti perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan daerah.

### **Berdaya Saing di bidang Agribisnis:**

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing di bidang agribisnis bermakna kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang agribisnis. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di

tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Dengan berdaya saing diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan berbasis agro produksi, agro industri dan agro teknologi.

### **Berbasis Perdesaan**

Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah dengan mayoritas berciri perdesaan. Sangat logis apabila perencanaan pembangunan disusun berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada di perdesaan. Berbasis perdesaan mengandung pengertian bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan pada dua paradigma utama yaitu, Membangun Desa dan Desa Membangun yang diarahkan pada pencapaian Desa yang maju, sejahtera dan demokratis.

Berbasis perdesaan bermakna pula Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yaitu meningkatnya derajat kesanggupan-kemampuan warga di kawasan perdesaan yang ditandai dengan: terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*); peningkatan penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber daya yang diperlukan; meningkatnya kesadaran akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya; serta meningkatnya kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.

### **MISI**

Berdasarkan Visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqul karimah dan Berkualitas.

2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dalam penyelenggarannya mengayomi aktivitas kegiatan koperasi, usaha kecil dan menengah dan Tenaga kerja, hal ini berkorelasi terhadap visi Pemerintah Daerah yaitu “ **KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DIBIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN** ”

Hal tersebut terutama dalam pernyataan “**Berdaya Saing di Bidang Agribisnis**”, dan mempunyai makna berkemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan sehingga menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing dalam tingkat local, regional, nasional dan internasional. Adapun keterkaitan dengan misi terdapat pada misi ke 1 (satu) yaitu *Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah dan Berkualitas*. dan misi ke 2 (dua) yaitu *Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di bidang agrobisnis dan Pariwisata*.

Berdasarkan program prioritas Bupati, Kabupaten Tasikmlaya mempunyai program “*Tasik Siap*” . Pada fase ketiga pencapaian RPJPD Tahun 2005-2025 yang sarannya menjadikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah yang berdaya saing, maka Bupati dan Wakil Bupati mengusung Program prioritas yang dikemas dalam jargon TASIK SIAP.

TASIK SIAP mengandung spirit kesiapan kepemimpinan dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan terpenuhinya kewajiban pemerintahan daerah kepada masyarakat dan dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. TASIK SIAP terdiri atas:

1. SIAP 1: Memastikan pemenuhan standar pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar
2. SIAP 2: Menjadikan sumberdaya manusia berakhlak dan berkualitas
3. SIAP 3: Berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif
4. SIAP 4: Mendayagunakan teknologi informasi.
5. SIAP 5: Menjamin kemudahan investasi

Berdasarkan program prioritas Bupati " TASIK SIAP" Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja mengacu pada **SIAP 3 : Berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif .**

### 3.3. Penentuan isu-isu Strategis

Berdasarkan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan keberadaan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Ketenagakerjaan serta Transmigrasi, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya dalam orientasi dan pendekatan



yang digunakan perkembangan dan pertumbuhannya sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016 - 2021.

Isu-isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya periode 2017-2021 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2016-2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Penanggulangan kemiskinan berbasis perdesaan;
- 2) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
- 3) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat;
- 4) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- 5) Lanjutan pembangunan infrastruktur kawasan pusat pemerintahan dan peningkatan 4 wilayah penunjang;
- 6) Peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah;
- 7) Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa;
- 8) Menjadikan pariwisata sebagai destinasi;
- 9) Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan;
- 10) Pembangunan infrastruktur perdesaan / perkotaan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman;
- 11) Peningkatan produksi di bidang pertanian;
- 12) Penataan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- 13) Peningkatan pengelolaan asset daerah;
- 14) Penanggulangan bencana daerah;
- 15) Peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan dan peningkatan peran lembaga keagamaan.

Setelah mempertimbangkan dari berbagai aspek faktor-faktor dari pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

yang mempengaruhi permasalahan pelayanannya, selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis, sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 sesuai tahun rencana adalah :

1. Kebutuhan dan penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi untuk menghadapi tuntutan dan permasalahan di masing-masing bidang;
2. Kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi Asean Free Trade Aggrement (AFTA) dan Asean Economy Community (AEC)/MEA
3. Kurangnya sarana prasarana dalam mendukung kinerja dan pelayanan pembinaan terhadap dunia usaha;
4. Meningkatkan pemanfaatan data base dan aplikasinya untuk memenuhi pelayanan Koperasi dan UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengoptimalkan potensi daerah.
5. Mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan potensi serta lokasi strategis untuk meningkatkan daya saing yang lebih kompetitif;
6. Mengoptimalkan regulasi Otonomi Daerah yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dalam memanfaatkan pangsa pasar yang semakin terbuka dan memberi peluang terhadap lapangan kerja;
7. Dibangunnya kemitraan dan penggunaan teknologi dalam mengantisipasi persaingan usaha yang semakin kompetitif dengan memanfaatkan potensi usaha;

8. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan produktivitas Koperasi dan UMKM dan Ketenagakerjaan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif;
9. Adanya lembaga keuangan alternatif yang dapat mengantisipasi permasalahan kebutuhan pendanaan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Peningkatan Kinerja pengurus Koperasi, pelaku UMKM dan Ketenagakerjaan.